

Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Korban Judi Online

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, belum ada dana atau arahan khusus dari dirinya terkait pemberian bansos untuk keluarga yang terdampak judi online.

"Gak ada," kata Jokowi dalam keterangannya usia peninjauan program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6).

Jokowi lebih lanjut mengatakan, belum ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi keluarga yang terdampak judi online.

"Gak ada" kata Jokowi. Diberitakan sebelumnya,

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak keluarga yang menjadi miskin akibat terdampak judi online.

"Termasuk banyak yang menjadi miskin (akibat judi online). Baru itu menjadi tanggung jawab kita tanggung jawab dari Kemenko

PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).

Akibat dampak tersebut, kata Muhadjir, pihaknya banyak memberikan advokasi bagi korban judi online. Bahkan dirinya memasukan mereka ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya," kata Muhadjir.

Muhadjir juga meminta bantuan kementerian sosial untuk membantu korban judul yang mengalami gangguan psikososial.

"Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," ungkapnya. ● han

Usut Dugaan Investasi Bodong, KPK Panggil Pejabat PT Taspen

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Dodi Susanto untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen, Rabu (19/6).

"Hari ini (19/6) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dodi Susanto (Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen) dengan tersangka Kosasih," kata Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu (19/6).

Sebelumnya, penyidik KPK selesai memeriksa Direktur Utama (nonaktif) PT Taspen, Antonius NS Kosasih terkait dugaan investasi

fiktif, Selasa (7/5) malam. Ia menjalani pemeriksaan lebih kurang 9,5 jam.

Saat keluar dari kantor Lembaga Antirasuah, Antonius sudah ditunggu awak media. Namun, sejumlah pertanyaan awak media tidak ia indahkan. Kosasih malah meminta awak media untuk menanyakan materi pemeriksannya ke tim penyidik KPK.

"Tanya saja ke dalam," kata Kosasih sambil berlalu.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya saat ini sedang memeriksa salah satu tersangka kasus dugaan investasi fiktif Taspen. Hal itu dikemukakan Asep ketika dirinya mendapat pertanyaan dari wartawan perihal hasil dari pemeriksaan Kosasih. ● lus

FOTO: ANT



SILATURAHMI HARI RAYA IDUL ADHA DI KEMENKO PMK

Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri) memberikan bingkisan kepada pegawai saat silaturahmi Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/6).

Uu Pilkada Digugat, MK Diminta Hapus Larangan Mantan Gubernur Jadi Cawagub

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, MK diminta menghapus aturan calon Wakil Kepala Daerah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah di wilayah yang sama.

Dilihat dari situs MK, Rabu (19/6), permohonan Isdianto itu didaftarkan ke MK pada Selasa (11/6). Dia mengajukan gugatan terhadap pasal Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam permohonannya, Isdianto menjelaskan dirinya awalnya merupakan Wakil Gubernur Kepri. Dia kemudian menjadi Plt Gubernur Kepri dan Gubernur Kepri menggantikan Nurdin Basirun yang ditangkap KPK.

Isdianto menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada

27 Juli 2020. Dia mengatakan jabatannya sebagai Gubernur Kepri berakhir pada 25 Februari 2021.

Schingga, Isdianto menjabat sebagai Gubernur Kepri selama 7 bulan. Isdianto merasa dirugikan dengan keberadaan pasal tersebut.

"Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang telah membuat ketidakpastian hukum untuk diri Pemohon dan sekalipun berpotensi menghilangkan "Hak untuk Diplib, atau right to be candidate" telah dihapus oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o a quo," ujar Isdianto dalam permohonannya.

Dalam petituannya ia minta MK megabulkan permohonannya, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang bertenangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ● mei

2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



PELEPASAN KRI DEWARUCI DI PELABUHAN DUMAI

Personel TNI Angkatan Laut memberikan hormat kepada Komandan KRI Dewaruci Letkol Laut (P) Rhony Lutviadhani saat akan berlayar menuju Sabang membawa Laskar Rempah Batch II MBJR 2024 dari Pelabuhan Dumai, Riau, Rabu (19/6). KRI Dewaruci telah menempuh pelayaran sejak (7/6) lalu dari Jakarta, Belitang Timur, Dumai dan Siak, berikutnya rombongan Batch II dari Dumai berlayar dengan rute Sabang, Malaka dan akan berakhir di Tanjung Uban pada (7/7).

Pemberantasan Judi Online di Indonesia Ternyata Lebih Pelik Dibandingkan TPPO

Tito Karnavian menegaskan, akan memberi sanksi tegas kepada para aparat sipil negara (ASN) yang terjerat judi online.

JAKARTA (IM) - Pemerintah akan melakukan kerjasama dengan interpol untuk menangkap para ban-

dar judi online. Ini tanda keseriusan Pemerintah untuk memberantas judi online. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keppres Satgas pemberantasan judi online.

"Betul tadi sangat penting diantara operasi pemberantasan judi online, yang penting

itu pemberantasan dan pencegahan, mulai dari pemain, penyedia portal, karena ada situs dan macam-macamnya, kemudian tetap saja bandar," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/6).

"Bandar itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu Sebagian besar ada di luar negeri. Kerjasama interpol, kerjasama antar negara, kerjasama antar kementerian luar negeri itu lebih penting," ujarnya.

Namun menurut Muhadjir, menanggulangi pemberantasan judi online ternyata lebih rumit dibandingkan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebab selain menangkap bandar, pihaknya juga harus memikirkan nasib korban dari judi online tersebut.

Tugas utama Satgas Pemberantasan Judi Online adalah pencegahan dan penindakan hukum.

Sedangkan pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk korban, yakni keluarga dari pelaku baru sebatas usulan pribadi, dan tak menjadi bagian penting tugas Satgas. Penindakan menjadi salah satu prioritas karena judi online adalah suatu tindak pidana.

Pihak-pihak yang terlibat, yakni penjudi hingga bandar pun akan tetap di proses secara hukum. Atas dasar itu, Muhadjir memastikan bahwa pelaku judi online tidak akan mungkin diberikan bansos.

Sedangkan yang ia pertimbangkan bisa mendapatkan bansos adalah pihak keluarga dari pelaku.

"Kalau penjudi itu bagian dari pelaku dan itu menurut Undang-Undang KUHAP Pasal 303 menyatakan bahwa judi itu tindak pidana. Begitu juga Undang-Undang ITE

Nomor 11 tahun 2008 Pasal 27. Judi online itu pidana dan termasuk pidana berat," kata Muhadjir.

Sanksi Tegas Bagi ASN

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, akan memberi sanksi tegas kepada para aparat sipil negara (ASN) yang terjerat judi online.

"Ya harusnya ada. Tapi saya belum bicarakan," kata Tito dalam keterangannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (19/6).

Namun Tito menyebut bahwa ASN bukan hanya diurus oleh Kemendagri saja, tapi juga pihak-pihak lain seperti Kementerian PAN-RB hingga badan administrasi kepegawaian negara.

"Kalau bicara ASN ini kan bukan hanya mendagri, mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat mendagri ga terkait, perlu dibicarakan dengan kementerian RB, badan administrasi kepegawaian negara (BAKN) dengan KASN yang independen, itu harus duduk bersama," ungkapnya.

Nantinya, Tito akan memerintahkan Sekretariat Jenderal nya untuk duduk membahas sanksi khusus bagi ASN yang terjerat judi online.

"Nanti saya minta Setjen duduk bersama kira-kira sanksi apa diberikan sesuai aturan UU untuk memberikan efek jera," tandasnya. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat PT. PELITA LUWUK ENERGI (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2024, bahwa para pemegang saham setuju dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan pertanggung jawaban Likuidator atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembebasan kekayaan Perseroan.
2. Membebaskan Likuidator dari segala kewajiban sebagai Likuidator dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de Charge) atas tindakan yang telah dilakukan sebagai Likuidator sepanjang tindakan tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat PT. JAWA UDYANA SURYA (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2024, bahwa para pemegang saham setuju dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan pertanggung jawaban Likuidator atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembebasan kekayaan Perseroan.
2. Membebaskan Likuidator dari segala kewajiban sebagai Likuidator dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de Charge) atas tindakan yang telah dilakukan sebagai Likuidator sepanjang tindakan tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami
Likuidator Perseroan

PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (Cessie)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur yang terlampir sebagai berikut:

Nama Debitur	Alamat	Jumlah Tagihan Per Tanggal 19 Juni 2024	Agunan Kredit
PT. Setia Jaya Waskita	Jl. Lorong 104 No. 44, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Rp. 129.168.893,75	SHM No. 1029/Pengasinan an. A. Sukarna seluas 12.150 m ²

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 21 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Collection & Recovery Center Jakarta
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.

Demikian untuk di ketahui semua pihak.

Jakarta, 19 Juni 2024
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Collection & Recovery Center Jakarta

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Pernah Minta SYL Agar Membantu Kampungnya

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata disebut pernah meminta bantuan program dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kampungnya di Klaten, Jawa Tengah, saat Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menjabat Menteri Pertanian.

Hal ini diungkap Sekjen Kementan nonaktif, Kasdi Subagyo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan terdakwa SYL dan Muhammad Hatta, Rabu (19/6).

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontho menanyakan Kasdi soal dirinya mengetahui adanya komunikasi SYL dengan Pimpinan Lembaga Antirasuah.

Kasdi menyebutkan, dirinya mengetahui komunikasi antara SYL dengan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang dalam sidang tersebut ia sebut dengan Alex Marwata. Hal itu ia ketahui saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Antirasuah.

"Saudara mendengar atau Pak Menteri kemudian ada hubungan dengan salah satu pejabat KPK? Pimpinan KPK? Ada hubungan ndak?" tanya Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontho di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya tidak ada, pada saat itu memang ada chatting tapi isinya bukan itu, ada chat-

ting beliau disampaikan oleh penyidik kepada saya ada di hp Pak Menteri Ada chatting itu, kemudian...," jawab Saksi.

"Chatting dengan siapa?" cecar Hakim.

"Antara Pak Menteri dengan salah satu Pimpinan KPK," jawab Saksi.

"Siapa namanya?" cecar Hakim lagi.

"Pada waktu itu adalah Pak Alex Marwata," timpal Saksi.

Kasdi menjelaskan, isi dari pesan tersebut bukan membahas soal kasus yang saat ini sedang bergulir di meja sidang.

"Itu malah apa, jabatan?" tanya Hakim.

"Dichattingnya itu kalau saya tidak salah itu ditunjukkan bahwa Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya Klaten untuk didukung programnya Pak Menteri," jawab Saksi.

Kasdi tidak mengetahui apakah permintaan tersebut dipenuhi oleh SYL atau tidak. Hakim Rianto pun kemudian menanyakan apakah komunikasi tersebut setelah atau sebelum adanya penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Kasdi sempat menjawab komunikasi tersebut terjadi setelah adanya penyelidikan. Namun, pernyataan itu segera ia revisi.

"Mohon izin Yang Mulia, seingat saya 2022 berati sebelum penyelidikan," ucap Kasdi.

FOTO: ANT



ASUMSI DASAR SEKTOR ESDM PADA RAPBN 2025 DISETUJUI

Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan) didampingi Irjen Kementerian ESDM Bambang Suswanto (kanan), Plt. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana (kedua kiri), dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi (kiri) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (19/6). DPR dan pemerintah menyetujui asumsi dasar sektor ESDM pada RAPBN 2025 dengan beberapa perubahan dari usulan Kementerian ESDM.